

**KONSEP HAK IJBAR WALI PADA PERNIKAHAN GADIS DEWASA
DALAM FILM *PERJALANAN PEMBUKTIAN CINTA* :
ANALISIS PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADА FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AZMIRA VONNA
21103050019**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsep hak ijbar wali dalam pernikahan gadis dewasa melalui analisis film *Perjalanan Pembuktian Cinta* dan ditinjau dari pemikiran KH. Husein Muhammad. Hak ijbar dipahami sebagai wewenang seorang wali, khususnya ayah, untuk menikahkan anak perempuan yang berada di bawah tanggung jawabnya tanpa persetujuan langsung dari anak tersebut. Dalam praktiknya, hak ini sering menimbulkan persoalan, khususnya ketika diterapkan dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai patriarki. Film yang dianalisis dalam penelitian ini menampilkan realitas sosial tersebut melalui tokoh perempuan yang mengalami pernikahan paksa atas dasar keputusan sepihak dari ayahnya.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan jenis penelitian pustaka (*library research*). Sumber utama yang dianalisis meliputi adegan, dialog, dan narasi dalam film, yang kemudian dikaji dengan teori pemikiran KH. Husein Muhammad. Pemikiran beliau digunakan sebagai landasan dalam menilai konsep hak ijbar wali, khususnya dalam konteks gadis dewasa. Data film diolah secara deduktif untuk melihat bagaimana konsep hak ijbar diterapkan dalam realitas sosial dan hukum, serta dibandingkan dengan pandangan KH. Husein Muhammad. Dalam pandangannya, ijbar tidak dimaknai sebagai hak untuk memaksa, melainkan sebagai tanggung jawab untuk membimbing dan menikahkan dengan pertimbangan maslahat serta persetujuan dari pihak perempuan. KH. Husein Muhammad menolak segala bentuk pemaksaan dalam pernikahan, dan menegaskan bahwa pernikahan yang dilakukan tanpa kerelaan pihak perempuan, terlebih yang sudah dewasa, tidak sah menurut syariat Islam.

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa penerapan hak ijbar harus dikontekstualisasikan dalam realitas sosial kontemporer agar tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Film *Perjalanan Pembuktian Cinta* menjadi media kritik sosial yang efektif untuk menggambarkan dampak negatif dari penyalahgunaan hak ijbar. Dengan demikian, pemikiran KH. Husein Muhammad memberikan solusi relevan terhadap praktik pernikahan paksa, sekaligus memperkuat pentingnya persetujuan, kebebasan, dan keadilan gender dalam institusi pernikahan.

Kata Kunci: Hak Ijbar, Wali Mujbir, Film, Pernikahan Paksa

ABSTRACT

This study examines the concept of *ijbar wali* rights in adult marriages through an analysis of the film *Perjalanan Pembuktian Cinta* (The Journey of Proving Love) and reviews the thoughts of KH. Husein Muhammad. *Ijbar* rights are understood as the authority of a guardian, especially a father, to marry off a daughter under his responsibility without her direct consent. In practice, this right often raises issues, especially when applied in societies that still uphold patriarchal values. The film analyzed in this study portrays this social reality through a female character who experiences forced marriage based on her father's unilateral decision.

This study employs a qualitative analytical method using a normative-juridical approach and a library research model. The primary sources analyzed include scenes, dialogues, and narratives from the film, which are then examined through the theoretical framework of KH. Husein Muhammad's thought. His ideas serve as the foundation for assessing the concept of *ijbar* rights of a guardian, particularly in the context of adult women. The film data is processed deductively to observe how the concept of *ijbar* is applied in social and legal realities, and then compared with KH. Husein Muhammad's perspective. In his view, *ijbar* is not interpreted as a right to compel, but rather as a responsibility to guide and arrange a marriage based on considerations of benefit (*maslahah*) and the consent of the woman involved. KH. Husein Muhammad firmly rejects all forms of coercion in marriage and asserts that a marriage conducted without the consent of the woman, especially one who is of legal age, is invalid according to Islamic law.

The results of this study confirm that the application of the right of *ijbar* must be contextualized within contemporary social realities to avoid violating principles of justice and human rights. The film *Perjalanan Pembuktian Cinta* serves as an effective social critique to illustrate the negative impacts of the abuse of the right of *ijbar*. Thus, KH. Husein Muhammad's thoughts provide a relevant solution to the practice of forced marriage, while reinforcing the importance of consent, freedom, and gender justice within the institution of marriage.

Keywords: Right of Coercion, Wali Mujbir, Film, Forced Marriage

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan di bawah ini:

Nama : Azmira Vonna
NIM : 21103050019
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KONSEP HAK IJBAR WALI PADA PERNIKAHAN GADIS DEWASA DALAM FILM *PERJALANAN PEMBUKTIAN CINTA*: ANALISIS PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis sebagai bahan referensi dalam penelitian dan disebutkan dalam susunan daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Juni 202

15 Dzulhijjah 1446 H



Azmira Vonna

NIM. 21103050019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Azmira Vonna

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari‘ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Azmira Vonna

NIM : 21103050019

Judul : “Konsep Hak Ijbar Wali Pada Pernikahan Gadis Dewasa Dalam Film
Perjalanan Pembuktian Cinta: Analisis Pemikiran Husein Muhammad”

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari‘ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Juni 2025 M
15 Dzulhijjah 1446 H

Pembimbing,



Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
NIP: 19900820 201801 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-697/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul

: KONSEP HAK IJBAR WALI PADA PERNIKAHAN GADIS DEWASA DALAM FILM *PERJALANAN PEMBUKTIAN CINTA*: ANALISIS PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZMIRA VONNA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050019
Telah diujikan pada : Senin, 16 Juni 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 6858be664f86c



Pengaji I

Dra. Hj. Erni Suhasti Syafe'i, M.S.I.
SIGNED

Valid ID: 685527f180a4c



Pengaji II

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6858bc5032974



Yogyakarta, 16 Juni 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6858c37422d7e

MOTTO

“Allah tidak membebani seorang hamba diluar batas kemampuannya”

(Al-Baqarah: 286)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan karya skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua, ayah dan mama yang senantiasa mendukung, memotivasi serta mendoakan penulis
2. Untuk adik-adikku dan keluarga besar yang penulis sayangi
3. Diri sendiri, dengan segala rasa syukur kepada Allah, skripsi ini kupersembahkan untuk diriku yang telah berjuang tanpa lelah. Perjalanan panjang ini telah mengajarkan banyak hal, dan aku bangga bisa menyelesaiakannya. Semoga ilmu yang kudapatkan bermanfaat bagi diriku dan orang lain.
4. Untuk seluruh guru, dan dosen yang telah memberikan arahan, bimbingan dan motivasi selama masa kuliah sampai proses penggerjaan skripsi ini. Setiap saran dan kritik sangat berarti untuk penulis.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
س	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ه	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan y

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	‘el
م	Mim	m	‘em
ن	Nun	n	‘en
و	Waw	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta' addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliyā'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' *marbūtah* hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَّةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-Fitrī
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

1.	-----ُ---	Fathah	ditulis	a
2.	-----ُـ---	Kasrah	ditulis	i
3.	-----ُـ---	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْنَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + yā' mati أَنْثَىٰ	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَلَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	û <i>'Ulum</i>

I. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wāwu mati قُولٌ	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

II. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتَ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْتَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِشْكَرْنَمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

III. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>Ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>An-Nisā'</i>

IV. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

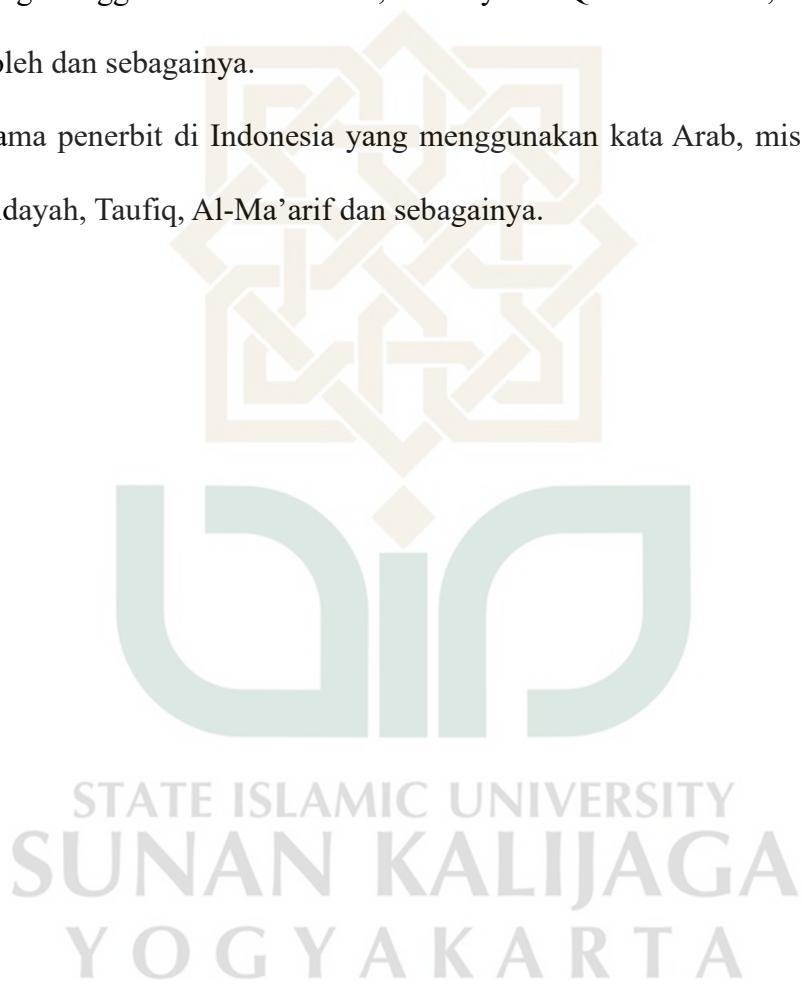
أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.

- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena atas kelimpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konsep Hak Ijbar Wali Pada Pernikahan Gadis Dewasa Dalam Film Perjalanan Pembuktian Cinta: Analisis Pemikiran Husein Muhammad”** ini dengan baik. Tak lupa pula shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) setelah menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di samping itu, penulis merasa bahwa selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari doa serta motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., M.Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Siti Djazimah S.Ag M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
6. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I. Selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang senantiasa sabar dan rela meluangkan waktu untuk senantiasa memberikan bimbingan, semangat dan motivasi kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terkhusus Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
8. Kepada keluarga tercinta, ayah dan mama yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis, sehingga penulis bisa melewati masa-masa sulit dengan baik. Tak lupa juga kepada adik-adikku, Uti, Anda dan Adek, meski sering bertengkar, tapi hal itulah yang membuat hubungan kita semakin dekat. Terima kasih banyak karena telah menghibur dan menguatkan penulis. Tanpa dukungan kalian, mungkin penulis masih kehilangan arah hingga saat ini.

9. Diri sendiri, yang telah berjuang tanpa lelah dan masih kuat dengan segala ujian dalam menyelesaikan skripsi ini. Perjalanan skripsi mengajarkan banyak hal, dan aku bangga bisa menyelesaikannya dengan baik.
10. Kepada teman-teman Aceh yang selalu bersama setiap saat dan sudah penulis anggap seperti keluarga sendiri, Bibil, Oja, Pia, Ira, Afifah, Isma dan Mawa, yang telah menjadi *moodbooster*, pendengar yang baik, serta pemberi solusi terhadap curahan hati penulis.
11. Kepada teman-teman dekat penulis, Lala, Ina, Tata, Aizza, Rahma, Nana, Risma, teman-teman Bocah Saven, dan seluruh teman-teman SEAL 21 yang telah membersamai penulis sejak masa perkuliahan *online* hingga bisa bertatap muka. Tidak terasa akhirnya perpisahan itu datang juga. Semoga teman-teman semua sukses terus dunia dan akhirat.
12. Kepada teman-teman KKN 312 Unlimeted Solidarity, Rizka, Triana, Amel, Fia, Allam, Ace, Rifqi dan Ardin, yang telah menjadi keluarga baru bagi penulis semenjak kkn. Meski setelah kkn jarang bisa ngumpul bersama, tapi semoga persahabatan ini tidak luntur yaa.
13. Kepada SHADIQ Jogja yang tetap mempertahankan silaturahmi sejak lulus dari Dayah Insan Qur'ani. Semoga kita semua sukses dan bisa bertemu lagi suatu saat nanti.
14. Seluruh keluarga besar KABY yang telah membersamai penulis sebagai sesama anak rantau Aceh Besar di Yogyakarta. Semoga KABY lebih sukses ke depannya.

15. Kepada kakak-kakak, teman-teman dan adik-adik yang pernah membersamai di Asrama Cut Nyak Dhien, terimakasih atas waktu, kehangatan dan kebersamaannya.
16. Seluruh keluarga besar UKM JQH Al-Mizan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan penulis pengalaman organisasi dan ilmu baru yang belum penulis dapatkan sebelumnya.
17. Seluruh pihak yang telah mendoakan penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini, semoga segala doa baik yang telah dipanjatkan diterima di sisi Allah dan diberi ganjaran dan kembali ke diri yang mendoakan.

Yogyakarta, 11 Juni 2025
15 Dzulhijjah 1446 H

Penulis



Azmira Vonna
NIM. 21103050019

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KONSEP PERWALIAN DALAM PERNIKAHAN	24
A. Konsep Wali Secara Umum	24
B. Konsep Wali Mujbir	31
BAB III GAMBARAN FILM PERJALANAN PEMBUKTIAN CINTA	46
A. Sinopsis Film Perjalanan pembuktian Cinta	46
B. Relevansi Film Perjalanan Pembuktian Cinta dengan Isu Kontemporer ...	50
C. Nilai dan Pesan Moral dalam Film	55
BAB IV ANALISIS KONSEP HAK IJBAR WALI PADA PERNIKAHAN GADIS DEWASA DALAM FILM PERJALANAN PEMBUKTIAN CINTA	62
A. Analisis Konsep Hak Ijbar Wali Pada Pernikahan Gadis Dewasa dalam Film Perjalanan Pembuktian Cinta	62
B. Analisis Konsep Hak Ijbar Wali Pada Pernikahan Gadis Dewasa Dalam Film perjalanan Pembuktian Cinta Tinjauan Pemikiran Husein Muhammad	68

BAB V	PENUTUP	75
A.	Kesimpulan	75
B.	Saran	76
DAFTAR PUSTAKA		78
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I
<i>Lampiran I Halaman Terjemahan</i>		I
<i>Lampiran II Biografi KH. Husein Muhammad</i>		III
<i>Lampiran III Dokumentasi</i>		VIII
<i>Lampiran IV Curriculum Vitae</i>		IX



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan atau perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”.¹ Selain sebagai tuntutan fitrah manusia, pernikahan juga merupakan langkah awal dalam membina kehidupan rumah tangga yang sakinah. Suatu pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun sebagaimana yang telah tercantum dalam kitab fiqh klasik maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu rukun dalam pernikahan adalah adanya wali.² Wali memiliki peran penting dalam proses akad nikah yang berfungsi sebagai perwakilan mempelai perempuan. Karena tanpa hadirnya wali dalam suatu akad nikah, maka hukumnya tidak sah.³

Konsep wali seringkali beriringan dengan adanya hak ijbar yang melekat pada dirinya. Wali sebagai orang yang berkuasa atas orang yang berada di bawah perwaliannya dapat menjadikan sebuah alasan untuk memilih calon pasangan bagi anak perempuannya. Melalui hak ijbar, seorang wali dapat menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa persetujuan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14.

³ Qurrotul Ainiyah, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi’I dan Imam Hanafi),” *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. 3:2, (2020), hlm. 109.

dari yang bersangkutan. Perempuan tidak memiliki hak untuk memilih calon pasangan hidupnya. Beberapa dari pernikahan tersebut dilakukan pada anak perempuan yang masih muda, tetapi mereka tidak dapat menolaknya.⁴ Baik suka atau tidak, seorang perempuan harus menerima pilihan walinya sebagai penentu dimulainya kehidupan rumah tangga. Apabila menolak, maka perempuan dianggap sebagai anak yang tidak taat pada orang tua. Hal ini seringkali ditemukan pada praktik perjodohan atau kawin paksa.⁵

Kebebasan dalam memilih calon pendamping hidup seringkali berbenturan dengan hak ijbar yang dimiliki oleh wali. Di sisi lain, pemilihan calon pasangan merupakan satu hal penting dalam suatu hubungan perkawinan, untuk mencapai suatu tujuan pernikahan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah, penuh rahmah. Maka, diperlukan usaha maksimal dalam memilih calon pendamping sesuai kriteria yang telah ditetapkan, tanpa adanya paksaan atau tekanan.⁶ Perkawinan yang didasarkan atas paksaan di beberapa kasus ternyata berujung pada perceraian. Contohnya di dalam penelitian yang dilakukan oleh Nuraida di Pengadilan Agama Tangerang dan jurnal penelitian yang dilakukan oleh Fathurrahman Marzuki dkk di Pengadilan Agama Kota Makassar, di mana pasangan yang menikah atas dasar paksaan memilih untuk bercerai.

⁴ Toha Andiko dkk, “Reactualization of Wali Mujbir in The Modern Era: Maqasid Sharia Analysis of Imam Shafi’I Concept Regarding Wali’s Ijbar Right,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 23:2, (2023), hlm. 275-276.

⁵ *Ibid*

⁶ Husnul Haq, “Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer,” *Palastren*, Vol. 8:1, (2015), hlm. 199.

Dalam Pasal 16 ayat (1) Kompilasi hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”.⁷ Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan dapat dilakukan atas persetujuan dan kerelaan dari kedua calon mempelai, tidak boleh ada paksaan dari pihak mana pun. Selanjutnya, Pasal 17 ayat (2) menjelaskan “bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan”.⁸ Dalam Pasal 71 poin f menjelaskan bahwa “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan dengan paksaan”.⁹ Pasal 72 ayat (1) juga menjelaskan bahwa “seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”.¹⁰ Artinya pernikahan harus dilakukan atas dasar persetujuan dan kerelaan dari kedua calon mempelai. Apabila dalam suatu perkawinan dilaksanakan di bawah paksaan atau ancaman maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Selain Kompilasi Hukum Islam di atas, Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”¹¹ Ketentuan ini menegaskan bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, baik dari orang tua, keluarga, maupun pihak lain. Setiap individu

⁷ Pasal 16 ayat (1).

⁸ Pasal 17 ayat (2).

⁹ Pasal 71.

¹⁰ Pasal 72 ayat (1).

¹¹ Pasal 6 ayat (1).

memiliki hak untuk menentukan pasangan hidupnya berdasarkan kehendak sendiri. Sehingga, pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa “apabila calon mempelai tidak setuju dengan perkawinan tersebut, maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan.”¹² Sementara akad nikah yang dilaksanakan dengan paksa, itu dapat dibatalkan.

Sekalipun sudah di atur dalam hukum positif di Indonesia, ternyata hak ijbar wali masih dianggap ada oleh masyarakat. Hal ini tergambar dari adanya film yang baru-baru ini ditayangkan yaitu film “Perjalanan Pembuktian Cinta”, yang diangkat dari novel karya Nusaibah Azzahra berdasarkan kisah nyata kehidupannya sendiri, yang berkenaan dengan pemaksaan perempuan untuk menikah yang dilakukan oleh ayah kandungnya. Film ini mencerminkan tantangan dan harapan yang dihadapi oleh gadis dewasa dalam menjalani kehidupan cinta dan pernikahan mereka.

Film sering kali mencerminkan realitas sosial dan dapat menjadi alat untuk memahami struktur kekuasaan dalam konteks gender.¹³ Pendekatan gender dalam analisis ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana film tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk berdiskusi tentang isu-isu sosial yang relevan. Film juga mampu menjadi medium kritik

¹² Pasal 27 ayat (1).

¹³ Andari S., “Film dan realita sosial: Representasi gender dalam sinema Indonesia,” *Jurnal Film dan Budaya*, Vol. 8:1, (2021), hlm. 45.

sosial yang kuat, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan gender dan kekuasaan.¹⁴

Selain itu, film dianggap sebagai sarana komunikasi dan informasi yang sangat efektif karena mampu menciptakan realitas yang sangat mirip dengan kehidupan masyarakat. Dengan demikian, definisi tersebut memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran dan hakikat film sebagai alat komunikasi yang penting dalam menciptakan representasi visual dan audio bagi penontonnya.¹⁵

Film juga merupakan sarana untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat melalui cerita, sekaligus menjadi media cerita ekspresi artistik bagi para seniman dan membuat film untuk mengekspresikan ide dan gagasan mereka.¹⁶ Oleh karena itu, film dapat diartikan sebagai karya seni berupa gambar bergerak atau media komunikasi visual yang dapat ditonton serta berfungsi untuk menyampaikan pesan kepada publik. Sebagai karya seni yang kompleks, film memiliki banyak manfaat dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Beberapa manfaat film dari sudut pandang pembuat film antara lain:

- a) Film dapat digunakan untuk mempengaruhi perilaku dan sikap audien secara signifikan.

¹⁴ Kurniawan B., “Film sebagai kritik sosial: Menggali pesan dalam sinema.” *Jurnal Budaya dan Media*, Vol. 7:1, (2018), hlm. 23.

¹⁵ Onong Uchjana, E. *Dimensi Dimensi Komunikasi*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 134.

¹⁶ Renardi Rahadian. O, Tri Cahyo.K. “Semiotika Tanda Visual Film Penyalin Cahaya”, *Jurnal Barik*, Vol.4:2, (2022), hlm. 119.

- b) Film dapat menjadi alat yang sangat efektif jika digunakan dengan cermat untuk menembus pertahanan rasionalitas dan berbicara langsung ke hati penonton secara menyakinkan.
- c) Film dapat dijadikan alat propaganda dan komunikasi politik.
- d) Film dapat memberikan dampak kuat terhadap penonton, terutama dalam mengubah sikap mereka.¹⁷

Melalui narasi yang dihadirkan, film Perjalanan Pembuktian Cinta mencerminkan realitas sosial di mana tradisi dan norma patriarki masih kuat, sehingga hak perempuan untuk menentukan jalan hidupnya sendiri seringkali terabaikan atau bahkan dilanggar. Film ini sangat relevan dengan isu-isu yang sedang dihadapi oleh masyarakat Indonesia saat ini, khususnya terkait hak perempuan, patriarki dan pernikahan paksa. Relevansi film ini tampak sangat jelas dalam konteks meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya persetujuan dan kebebasan individu dalam pernikahan. Seperti yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia bahwa persetujuan kedua mempelai merupakan syarat sahnya perkawinan, dan apabila dilakukan secara paksa maka pernikahan tersebut dapat dibatalkan. Namun, praktiknya di lapangan masih menunjukkan adanya tekanan keluarga, terutama orang tua, yang memaksakan kehendak mereka atas nama tradisi, agama atau ekonomi, sehingga perempuan seringkali menjadi korban pernikahan paksa atau perjodohan yang tidak diinginkan.

¹⁷ *Ibid.*

Berangkat dari problematika tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana hukum memandang hak ijbar wali dalam pernikahan. Dengan menganalisis film “Perjalanan Pembuktian Cinta” diharapkan dapat dijadikan sumber untuk memahami bagaimana tantangan yang dihadapi oleh gadis dewasa dalam menjalani kehidupan cinta dan pernikahan mereka, serta bagaimana hukum dapat memberikan solusi yang relevan untuk permasalahan ini.

Dalam hal ini, peneliti menggunakan teori pemikiran KH. Husein Muhammad mengenai hak ijbar wali. Sebagian besar ulama memahami ijbar sebagai hak untuk memaksa dalam pernikahan. Penafsiran ini tentu tidak lepas dari konteks sosial yang melatarbelakanginya, yaitu budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat Arab pada masa itu. Namun, pandangan ini berbeda dengan pendapat KH. Husein Muhammad yang menafsirkan ijbar sebagai hak untuk membimbing dan menikahkan, bukan memaksa. Perbedaan penafsiran ini dipengaruhi oleh kondisi sosial modern yang terjadi pada masa sekarang serta pengalaman KH. Husein Muhammad, baik di ranah akademik maupun non-akademik, yang membuatnya lebih peka terhadap isu diskriminasi terhadap perempuan dalam praktik pernikahan.

Pentingnya penelitian ini tidak hanya dari sudut pandang teoritis, tetapi juga dari implikasi praktis yang dapat di ambil untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan hak dan kewajiban dalam pernikahan. Dengan menganalisis film Perjalanan pembuktian Cinta, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang pentingnya keadilan,

komunikasi, dan hak kebebasan, serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hukum.

Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk mengkaji secara komprehensif terkait dengan peran dan posisi wali dalam pernikahan secara umum dan konsep hak ijbar secara khusus, serta mengungkap bagaimana relevansi konsep hak ijbar wali di era modern ini yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul **“KONSEP HAK IJBAR WALI PADA PERNIKAHAN GADIS DEWASA DALAM FILM PERJALANAN PEMBUKTIAN CINTA: ANALISIS PEMIKIRAN HUSEIN MUHAMMAD”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep hak ijbar wali pada pernikahan gadis dewasa digambarkan dalam film “Perjalanan Pembuktian Cinta”?
2. Bagaimana tinjauan pemikiran Husein Muhammad terhadap konsep hak ijbar wali pada pernikahan gadis dewasa dalam film “Perjalanan Pembuktian Cinta”?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis paparkan, maka tujuan penelitian ini adalah:
 - a. Untuk menjelaskan konsep hak ijbar wali pada pernikahan gadis dewasa dalam film “Perjalanan Pembuktian Cinta”.
 - b. Untuk menganalisis pemikiran Husein Muhammad mengenai konsep hak ijbar wali pada pernikahan gadis dewasa.

2. Kegunaan Penelitian

a. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan khususnya dalam ranah kajian Hukum Keluarga Islam di Indonesia, terutama perihal praktik wali mujbir dalam pernikahan.

b. Praktis

Agar dapat menjadi sarana yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat luas pada umumnya, juga dapat menjadi bahan kajian ilmiah selanjutnya dan dapat menjadi manfaat bagi keluarga di masa yang akan datang, baik diri sendiri ataupun secara umum.

D. Telaah Pustaka

Setelah penulis menelaah berbagai literatur, penulis menemukan pembahasan berupa skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan judul ini, diantaranya yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Fika Nur Faiddatun Najah, *Pesan Dakwah Dalam Film Perjalanan Pembuktian Cinta*.¹⁸ Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pesan dakwah yang ada dalam film perjalanan pembuktian cinta perspektif semiotika Roland Barthes meliputi tiga pesan dakwah: pesan akidah yaitu tawakal kepada Allah dan tidak bergantung pada manusia, kesabaran menghadapi ujian, dan bersyukur atas takdir yang Allah berikan. Pesan akhlak

¹⁸ Fika Nur Faiddatun Najah, “Pesan Dakwah Dalam Film Perjalanan Pembuktian Cinta,” *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024.

meliputi ikhlas dan berbakti kepada kedua orangtua, pentingnya saling memaafkan yang menunjukkan akhlak terpuji. Dan pesan syariat meliputi kewajiban menutup aurat, larangan mendekati zina, konsep poligami yang sesuai syariat islam, serta hak-hak anak dalam islam. Perbedaannya terletak pada topik yang di bahas, dimana dalam penelitian ini membahas pesan dakwah yang terkandung dalam film perjalanan pembuktian cinta.

Skripsi yang ditulis oleh Melliawati, *Representasi Makna Pernikahan Dalam Islam Pada Film Mengejar Surga (Analisis Tzvetan Todorrov)*.¹⁹ Penelitian ini membahas film *Mengejar Surga* yang menceritakan tentang perjalanan seorang perempuan yang mencari ayahnya untuk menjadi wali dalam pernikahannya. Hasil dalam penelitian ini menggunakan analisis naratif model Tzvetan Todorov yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu dalam mengkaji secara kronologis dengan struktur yang terbagi menjadi alur awal (keseimbangan), alur tengah (gangguan), dan alur akhir (keseimbangan kembali) untuk mendapatkan sebab dan akibat yang terdapat pada film *Mengejar Surga*. Setelah itu, peneliti membagi makna pernikahan yang direpresentasikan dalam film menjadi tiga kategori yaitu syarat sah dan rukun pernikahan, batasan orang tua atau mertua dalam pernikahan, dan kasih sayang dalam pernikahan yang mencakup sakinnah, mawaddah, warrahmah. Perbedaannya terletak pada pembahasan dan teori yang digunakan, yaitu menggunakan analisis naratif model Tzven Todorrov.

¹⁹ Melliawati, “Representasi Makna Pernikahan Dalam Islam Pada Film Mengejar Surga (Analisis Tzvetan Todorrov),” *Skripsi* Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Jurnal yang ditulis oleh Moh. Ismail dan Faiqoh Zuhdiana, *Relevansi Hak Wali Mujbir dalam Pernikahan Anak Gadis Ditinjau dari Perspektif Gender dan Hukum Islam*.²⁰ Hasil dari penelitiannya menyimpulkan bahwa adanya wali mujbir dalam sebuah pernikahan anak gadis adalah diperbolehkan dengan catatan memberikan perlindungan dan kebijakan untuk kemaslahatan anak gadis tersebut. Sedangkan persetujuan dalam pernikahan tetap kepada gadis yang bersangkutan. Perbedaannya terletak pada perspektif yang ditinjau, yaitu menggunakan perspektif gender hukum islam.

Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Khoiri, *Konsep KH Husein Muhammad Tentang Wali Mujbir Dalam Perkawinan*.²¹ Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu pemahaman terhadap apa yang dikenal dengan hak ijbar. Hak ijbar dipahami oleh banyak orang sebagai hak memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya (wali mujbir). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa menurut KH. Husein Muhammad terkait dengan wali mujbir ini, anak berhak menolak dikawinkan dengan laki-laki yang tidak setara tanpa persetujuannya serta orang tua juga berhak menolak keinginan anak gadisnya untuk menikah dengan laki-laki yang tidak setara. Melalui analisis data yang diperoleh, KH. Husein Muhammad memandang aspek maslahah sebagai acuan dalam beristinbat dengan tetap

²⁰ Moh. Ismail dan Faiqoh Zuhdiana, *Relevansi Hak Wali Mujbir dalam Pernikahan Anak Gadis Ditinjau dari Perspektif Gender dan Hukum Islam*.” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7:2, (2020).

²¹ Miftahul Khoiri, “Konsep KH Husein Muhammad Tentang Wali Mujbir Dalam Perkawinan,” *Thesis* Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

memperhatikan pendapat para ulama fuqaha'. Mengingat perkawinan merupakan suatu ibadah, maka hendaknya setiap mengambil keputusan apapun jenisnya harus dipertimbangkan. Tidak terkecuali dalam memilih pasangan hidup yang pada akhirnya bisa tercapai kebahagiaan lahir batin, pernikahan yang penuh *mawaddah, mahabbah wa rahmah*.

Skripsi yang ditulis oleh Ayu Rosidah, *Keberlakuan ijbar pada perempuan (perspektif empat mazhab)*.²² Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa empat mazhab sepakat bahwa seorang ayah diperbolehkan menikahkan anak yang masih kecil tanpa persetujuannya. Namun pada gadis dewasa, memiliki perbedaan pendapat di kalangan empat mazhab. Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali berpendapat bahwa ijbar berlaku bagi gadis kecil dan dewasa. Sedangkan mazhab hanafi tidak memberlakukan ijbar pada gadis dewasa atau janda. Perbedaannya terletak pada perspektif yang digunakan, yaitu menggunakan perspektif empat mazhab.

Jurnal yang ditulis oleh Fathurrahman Marzuki, M. Arfin Hamid, Ratnawati, *Implikasi Hak Ijbar Terhadap Perceraian di Kota Makassar*.²³ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan data lapangan dan teori yang telah dipaparkan, ditemukan data yang menunjukkan adanya implikasi hak ijbar terhadap angka perceraian di Kota Makassar. Adapun perbedaan

²² Ayu Rosidah, "Keberlakuan Ijbar Pada Perempuan (Perspektif Empat Mazhab)," *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2022.

²³ Fathurrahman Marzuki dkk, "Implikasi Hak Ijbar Terhadap Perceraian di Kota Makassar," *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol.5:3, (2023).

terletak pada obyek penelitian, yaitu melihat bagaimana konsep hak ijbar wali di zaman sekarang ini.

Dari pemaparan beberapa sumber diatas, bahwasanya penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Dapat dilihat dari perbedaan yang penulis cantumkan di atas. Sedangkan persamaan dari keenam penelitian ini, pokok pembahasan yang diteliti dengan penulis sama-sama meneliti tentang konsep wali mujbir dalam pernikahan.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritis merupakan salah satu pendukung sebuah penelitian, hal ini karena kerangka teoritis adalah wadah dimana akan dijelaskan teori-teori yang berhubungan dengan variabel-variabel yang diteliti. Kerangka teori merupakan wadah yang menerangkan variabel atau pokok permasalahan yang terkandung dalam penelitian. Teori-teori tersebut digunakan sebagai bahan acuan untuk pembahasan selanjutnya. Dengan demikian, kerangka teoretis disusun agar penelitian diyakini kebenarannya.²⁴

Dalam penelitian ini, teori yang akan penulis gunakan yaitu pemikiran K.H. Husein Muhammad tentang Ijbar wali. Sebagian besar ulama memahami ijbar sebagai hak untuk memaksa dalam pernikahan. Penafsiran ini tentu tidak lepas dari konteks sosial yang melatarbelakanginya, yaitu budaya patriarki yang mengakar kuat dalam masyarakat Arab pada masa itu. Namun, pandangan ini berbeda dengan pendapat KH. Husein Muhammad, seorang ulama

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, edisi revisi VI, Cetakan ke 13, (Jakarta: PT. Asdi Mahasatya, 2006), hlm. 107.

kontemporer, yang menafsirkan ijbar sebagai hak untuk membimbing dan menikahkan, bukan memaksa.²⁵ Perbedaan penafsiran ini dipengaruhi oleh kondisi sosial modern serta pengalaman KH. Husein Muhammad, baik di ranah akademik maupun non-akademik, yang membuatnya lebih peka terhadap isu diskriminasi terhadap perempuan dalam praktik pernikahan.

KH. Husein Muhammad berpendapat bahwa hak ijbar seharusnya tidak dimaknai sebagai wewenang untuk memaksa perempuan menikah, melainkan sebagai hak untuk menikahkan dan memberikan arahan. Jika ijbar dimaknai sebagai bentuk paksaan, maka hal itu cenderung bermakna *ikrāh* (pemaksaan), yang jelas dilarang dalam Islam karena dapat membahayakan perempuan dan menempatkannya dalam tekanan yang mengancam. Selain itu, pemaknaan seperti itu juga dapat merampas hak perempuan dalam menentukan pilihan terhadap calon suami yang diinginkannya.²⁶

KH. Husein Muhammad berpendapat bahwa wali mujbir adalah untuk setiap gadis yang masih berusia muda. Menurutnya, batas usia yang dimaksud sebagai "masih muda" adalah ketika seorang gadis belum mencapai usia baligh. Dalam kondisi ini, wali mujbir berhak menikahkan anak perempuan yang berada dalam tanggung jawabnya tanpa harus meminta persetujuan langsung dari anak tersebut. KH. Husein Muhammad memberikan alasan bahwa anak

²⁵ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cetakan V, (Yogyakarta: LKiS, 2009), hlm. 104-105.

²⁶ Isyrofah Tazkiyah Iroyna, "Ijbar Dalam Konteks Kekinian: Telaah Pemahaman KH. Husein Muhammad," *Qisthosia: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 5:1, (2024), hlm. 8.

yang belum baligh belum dianggap matang secara hukum dan belum siap mengambil keputusan penting, termasuk dalam hal pernikahan. Oleh karena itu, untuk mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka diberikanlah kewenangan kepada wali untuk mengambil keputusan tersebut. Selain itu, anak yang masih kecil belum memiliki pengetahuan maupun pengalaman yang cukup mengenai pernikahan, sehingga dinilai belum mampu diajak bermusyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan.²⁷

KH. Husein Muhammad membedakan pegertian antar makna *taklīf*, *ikrāh*, dan *ijbar*, yang sering diartikan sebagai bentuk paksaan. *Ikrāh* merujuk pada kondisi di mana seseorang dipaksa melakukan suatu tindakan tertentu karena adanya tekanan atau ancaman yang mengancam keselamatan jiwa atau fisiknya, dan ia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri. Tindakan tersebut bertentangan dengan kehendak batinnya. Sementara itu, *taklīf* merupakan suatu paksaan terhadap seseorang untuk melakukan suatu tindakan sebagai konsekuensi dari keyakinan yang ia terima secara sadar. Artinya, tindakan itu menjadi keharusan karena ia sendiri telah memilih untuk memeluk suatu ajaran atau kepercayaan tertentu. *Ijbar*, menurut KH. Husein Muhammad adalah tindakan yang dilakukan atas dasar tanggung jawab, bukan karena tekanan atau ancaman. Dalam konteks ini, seseorang melaksanakan sesuatu

²⁷ Miftahkul Khoiri, “Wali Mujbir perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad,” *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 20:1, (2024), hal. 56.

bukan karena dipaksa secara eksternal, melainkan karena adanya tanggung jawab moral atau hukum yang melekat padanya.²⁸

Menurut KH. Husein Muhammad, hak wali mujbir dalam menentukan jodoh untuk anak gadisnya bukanlah suatu kewajiban mutlak yang harus ditaati oleh si anak. Ia menegaskan bahwa keputusan akhir dalam memilih pasangan hidup sepenuhnya berada di tangan anak perempuan itu sendiri. Jika seorang wali memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak, padahal anak tersebut secara terang-terangan menolak, namun akad tetap dilangsungkan, maka pernikahan semacam itu dianggap tidak sah. Pemaksaan semacam ini, menurut KH. Husein Muhammad, termasuk dalam kategori *ikrāh*, yaitu paksaan yang mengekang kebebasan batin seseorang. KH. Husein Muhammad menilai bahwa peran wali mujbir adalah sebatas memberikan bimbingan dan arahan. Orang tua atau wali memang memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dan saran terkait pasangan yang dianggap cocok, namun keputusan final tetap harus berada di tangan anak gadis itu sendiri sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan dan hak pribadinya.²⁹

Pemikiran KH. Husein Muhammad juga selaras dengan hukum positif di Indonesia. Adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang membahas mengenai persetujuan dan kerelaan kedua calon mempelai menjadi syarat sahnya sebuah pernikahan. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²⁸ Husein Muhammad, *Fikih Perempuan Refleksi...* hlm. 105-107.

²⁹ Miftahkul Khoiri, *Wali Mujbir perspektif...* hlm. 59-60.

tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”³⁰ Pasal 27 ayat (1) menyatakan “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”.³¹ Ketentuan ini menegaskan bahwa pernikahan tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, baik dari orang tua, keluarga, maupun pihak lain. Setiap individu memiliki hak untuk menentukan pasangan hidupnya berdasarkan kehendak sendiri. Menyangkut kehidupan pribadi dan masa depan seorang, maka persetujuan atau kehendak bebas dari kedua belah pihak menjadi syarat mutlak. Sehingga, apabila calon mempelai tidak setuju dengan perkawinan tersebut, maka akad nikah tidak dapat dilaksanakan. Sementara akad nikah yang dilaksanakan dengan paksa, itu dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan hukum.

Selain Undang-Undang di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur peran wali dalam pernikahan secara rinci. Wali nikah bahkan disebut sebagai salah satu unsur penting yang menjadi rukun sekaligus syarat sahnya sebuah perkawinan. Hal ini tercantum dalam Bab IV Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa “suatu perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila terdapat calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta pelafalan ijab dan qabul.”³²

³⁰ Pasal 6 ayat (1).

³¹ Pasal 27 ayat (1).

³² Pasal 14.

Dalam Pasal 16 ayat (1) Kompilasi hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa “perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai”.³³ Ketentuan ini menegaskan bahwa perkawinan dapat dilakukan atas persetujuan antara pasangan yang akan menikah, tidak boleh ada paksaan dari pihak mana pun. Dengan demikian, ayah atau wali calon isteri tidak dapat memaksakan perkawinan anak gadisnya. Adapun bentuk persetujuan dapat ditunjukkan berupa pernyataan tegas bahwa dirinya setuju, dengan tulisan, ataupun berupa diam dalam artian tidak menolak, seperti yang dicantumkan dalam pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 17 ayat (2) menjelaskan “bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan”.³⁴ Dalam Pasal 71 poin f menjelaskan bahwa “suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila perkawinan tersebut dilangsungkan dengan paksaan”.³⁵ Pasal 72 ayat (1) juga menjelaskan bahwa “seorang suami atau istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum”.³⁶ Artinya pernikahan harus dilakukan atas dasar persetujuan dan kerelaan dari kedua calon mempelai. Apabila kedua calon mempelai tidak setuju, maka akad nikah

³³ Pasal 16 ayat (1).

³⁴ Pasal 17 ayat (2).

³⁵ Pasal 71.

³⁶ Pasal 72 ayat (1).

tidak bisa dilaksanakan. Dan akad nikah yang dilaksanakan dengan paksaan atau ancaman maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Perundang-undangan perkawinan di Indonesia tidak mengakui adanya hak ijbar pada wali. Perundang-undangan perkawinan Indonesia mengharuskan adanya persetujuan dari calon mempelai sebelum akad dilaksanakan. Apabila terdapat perkawinan paksa, maka para mempelai dapat mengajukan permohonan pembatalan di Pengadilan Agama. Hal ini terjadi karena adanya pembaharuan Hukum Keluarga Islam, yang disesuaikan dengan konteks kehidupan di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan³⁷. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah metode yang digunakan dalam menyelidiki suatu rumusan masalah yang diangkat.³⁸ Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini

³⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), hlm 1.

³⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghala Indonesia, 2014), hlm 43.

termasuk kategori penelitian pustaka (*library research*). *Library research* merupakan metode penelitian yang berfokus pada literatur yang ada, baik buku, jurnal, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.³⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis. Deskriptif yaitu menggambarkan serta menguraikan secara tepat tentang hak ijbar. Sedangkan analisis yaitu jalan untuk memperoleh ilmu pengetahuan baik melalui jalan primer atau sekunder.⁴⁰

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis-normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁴¹

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.⁴² Dalam penyusunan ini peneliti mengumpulkan secara

³⁹ Zikriadi dkk, “Aneka Jenis Penelitian,” *SAMBARA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1:1, (2023), hal. 39.

⁴⁰ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996), hlm. 31.

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 308.

langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang sedang dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek primer nya adalah dialog-dialog atau adegan-adegan yang menggambarkan konsep hak ijbar wali dalam film “Perjalanan Pembuktian Cinta”.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang menjadi rujukan pelengkap topik ini. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder berupa buku, jurnal dan skripsi yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan buku dan jurnal yang berisi argumen, teori, hukum-hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik yang diteliti.⁴³

6. Analisis Data

Data kualitatif adalah data non-angka yang sangat berpengaruh terhadap proses penelitian dan pembahasan mengenai konsep wali mujbir dalam film perjalanan pembuktian cinta dalam film Perjalanan Pembuktian Cinta tinjauan pemikiran Husein Muhammad. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deduktif, bertujuan mengumpulkan data melalui pengambilan teori mengenai pandangan hukum islam dan

⁴³ Annisa Rizky Fadilla dan Purtri Ayu Wulandari, “Literatur Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data,” *Mitita Jurnal Penelitian*, Vol. 1:3, (2023), hlm. 41.

hukum positif di Indonesia, dialog, adegan-adegan dan scene-scene yang telah di analisis.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dari penelitian ini penulis membaginya menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang dimulai dengan pendahuluan dan diakhiri dengan kesimpulan. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini meliputi:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi pemaparan latar belakangan persoalan, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang membahas bahwa penelitian ini signifikan untuk diteliti, telaah pustaka yaitu menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan, kerangka teori membahas teori yang digunakan yaitu pemikiran husein Muhammad mengenai Ijbar Wali, metode penelitian yang digunakan, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis menjelaskan konsep perwalian dalam pernikahan. Pada bab ini terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu membahas tentang konsep wali secara umum, termasuk didalamnya pengertian wali dan dasar hukumnya, urutan wali dalam pernikahan dan syarat-syarat wali. Pada sub-bab selanjutnya membahas tentang konsep wali mujbir, termasuk didalamnya pengertian wali mujbir dan dasar hukumnya, syarat-syarat wali mujbir, konsep hak ijbar wali dalam fikih klasik empat mazhab dan konsep hak ijbar wali dalam hukum positif di Indonesia.

Bab ketiga, penulis akan mendeskripsikan film Perjalanan Pembuktian Cinta, yaitu memaparkan sinopsis film, relevansi film dengan isu kontemporer serta nilai sosial dan pesan moral dalam film.

Bab keempat, penulis akan menganalisis konsep hak ijbar wali pada pernikahan gadis dewasa dalam film perjalanan pembuktian cinta dan juga menganalisis konsep hak ijbar wali pada pernikahan gadis dewasa perspektif pemikiran Husein Muhammad.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Kemudian disertai dengan daftar pustaka sebagai referensi dari penelitian ini.

Dengan sistematika pembahasan ini, penelitian diharapkan dapat disajikan secara terstruktur dan konprehensif, memudahkan pembaca untuk mengikuti alur pemikiran dan menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji konsep hak ijbar wali pada pernikahan gadis dewasa yang digambarkan dalam film *Perjalanan Pembuktian Cinta* menggunakan pemikiran KH. Husein Muhammad. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Konsep hak ijbar wali dalam film *Perjalanan Pembuktian Cinta* digambarkan sebagai bentuk dominasi wali (ayah) terhadap anak perempuan dalam menentukan pasangan hidup tanpa persetujuan dari yang bersangkutan. Tokoh Fathia sebagai gadis dewasa dipaksa menikah oleh ayahnya dengan alasan ekonomi, tanpa diberikan ruang untuk menolak atau menyampaikan kehendaknya. Hal ini menunjukkan bahwa hak ijbar dalam film tidak diposisikan sebagai perlindungan, melainkan sebagai bentuk paksaan yang melanggar hak perempuan. Akibat dari pernikahan paksa tersebut, Fathia mengalami tekanan sosial, psikologis, serta ketidakadilan dalam rumah tangga. Film ini menjadi cerminan bahwa praktik hak ijbar wali masih terjadi dan dapat menyebabkan penderitaan, terutama bagi perempuan.
2. Tinjauan pemikiran KH. Husein Muhammad terhadap konsep hak ijbar wali pada pernikahan gadis dewasa menunjukkan adanya reinterpretasi progresif yang berpihak pada hak dan martabat perempuan, dengan

menekankan bahwa hak ijbar bukanlah bentuk pemaksaan melainkan pendampingan dan bimbingan yang tetap menjunjung tinggi persetujuan dari pihak perempuan. KH. Husein Muhammad menolak pemahaman fikih klasik yang menganggap wali, terutama ayah atau kakek, memiliki kuasa mutlak untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis meskipun sudah dewasa. Menurutnya, hak ijbar harus dipahami bukan sebagai otoritas mutlak untuk memaksa, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum yang dijalankan dalam semangat kasih sayang dan perlindungan. Dengan demikian, KH. Husein Muhammad mendorong penafsiran ulang terhadap teks-teks fikih agar lebih kontekstual, adil, dan relevan terhadap zaman modern, khususnya dalam memperjuangkan hak perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya secara mandiri.

B. Saran

Meskipun penelitian ini telah berusaha menganalisis konsep hak ijbar wali pada pernikahan gadis dewasa dalam film Perjalanan Pembuktian cinta dan tinjauan pemikiran KH. Husein Muhammad, penulis menyadari bahwa karya ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasannya. Oleh karena itu, penulis mengajukan beberapa saran untuk pengembangan studi selanjutnya, yaitu:

1. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar dapat memperluas kajian mengenai konsep hak ijbar wali dengan objek penelitian yang berbeda, seperti membandingkan praktik ijbar wali dalam berbagai budaya lokal atau komunitas Islam di Indonesia.

2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan agar terus mengembangkan penelitian dari sisi lain, contohnya feminism tokoh Fathia dalam film Perjalanan Pembuktian cinta.
3. Perlu ada penyadaran kepada masyarakat bahwa hak memilih pasangan merupakan hak asasi, serta Pemerintah juga harus memperketat pengawasan terhadap praktik pernikahan paksa.



DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan dan Diklat Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Edisi Penyempurnaan 2019, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis

Abu Dawud, *Kitab Sunan Abu Dawud*, Jilid 2, No. 2083, Matthba'ah al Anshori Badhali, India, 1905.

Imam Muslim, *Kitab Shahih Muslim*. Jilid 2, No. 1419. Mathba'ah Isa al Baabi al-Hilbi, Kairo, 1955.

Imam Muslim, *Shahih Muslim*. No. 3476. Daar As-Salam, Riyadh, 2000.

3. Fikih/Ushul Fikih

Aspandi, *Fikih Perkawinan Komparatif Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2018.

Ayu Rosidah, "Keberlakuan Ijbar Pada Perempuan (Perspektif Empat Mazhab)," *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cetakan ke-15, Yogyakarta: INSISTPress, 2016.

M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Melliawati, "Representasi Makna Pernikahan Dalam Islam Pada Film Mengejar Surga (Analisis Tzvetan Todorov)." *Skripsi* Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023.

Miftahul Khoiri, "Konsep KH Husein Muhammad Tentang Wali Mujbir Dalam Perkawinan," *Thesis* Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.

Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cetakan V, Yogyakarta: LkiS, 2009.

Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*, Cetakan III, Yogyakarta: LkiS, 2009.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdaMIA+TAZZAFA, 2024.

Ridha, Akbar Fadhlul, ‘Hak Wali Ijbar Dalam Pndangan Maqashid Al-Syari’ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Ridha, Akbar Fadhlul, ‘Hak Wali Ijbar Dalam Pndangan Maqashid Al-Syari’ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i),” *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Sudarto, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Supriadi, *Fikih Munakahat*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2023.

Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7. Damaskus: Dār al-Fikr, 1985.

4. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

5. Jurnal

Abdul Hadi dan Wahyu Fitrianoor, “Hak Ijbar Wali Nikah Dalam Tinjauan Sadd Al-Dzari’ah (Studi Perbandingan Ulama Hanafiyah dan Ulama Syafi’iyah),” *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 1. 2024.

Ainiyah, Qurrotul, “Kedudukan Wali Dalam Pernikahan (Perspektif Imam Syafi’I dan Imam Hanafi),” *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, Vol. III, No. 2. 2020.

Andiko, Toha, dkk, “Reactualization of Wali Mujbir in The Modern Era: Maqasid Sharia Analysis of Imam Shafi’I Concept Regarding Wali’s

- Ijbar Right,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 23, No. 2. 2023.
- Annisa Rizky Fadilla dan Purtri Ayu Wulandari, “Literatur Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data,” *Mitita Jurnal Penelitian*, Vol. 1, No. 3. 2023.
- C. Kurniawan, “Film sebagai kritik sosial: Menggali pesan dalam sinema,” *Jurnal Budaya dan Media*, Vol. 7, No. 1. 2018.
- Fathurrahman Marzuki dkk, “Implikasi Hak Ijbar Terhadap Perceraian di Kota Makassar,” *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Vol. 5, No. 3. 2023.
- Haq, Husnul, “Reformulasi Hak Ijbar Fiqhi Dalam Tantangan Isu Gender Kontemporer,” *PALASTREN*, Vol. 8, No.1. 2015.
- Hidayat, Syaiful, “*Wali Nikah Dalam Perspektif Empat Mazhab*,” *Jurnal Inovatif*, Vol. 2, No. 1. 2017.
- Humaeroh, “Peran Wali Dalam Perspektif Fikih,” *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan, dan Kebudayaan*, Vol. 24, No. 2. 2023.
- Iroyna, Isyrofah Tazkiyah, “Ijbar Dalam Konteks Kekiniah: Telaah Pmehaman KH. Husein Muhammad,” *Qisthosia: Jurnal Syari’ah dan Hukum*, Vol. 5, No. 2. 2024.
- Juanda Holipah Ispraja dkk, “Analisis Semiotika Pesan Dakwah Pada Film Perjalanan Pembuktian Cinta,” *Interaction: Communication Studies Journal*, Vol. 1, No. 4. 2025.
- Khoiri, Miftahkul, “Wali Mujbir perspektif Pemikiran KH. Husein Muhammad,” *Tahkim: Jurnal Hukum dan Syari’ah*, Vol. 20, No. 1. 2024.
- Moh. Ismail dan Faiqoh Zuhdiana, “Relevansi Hak Wali Mujbir dalam Pernikahan Anak Gadis Ditinjau dari Perspektif Gender dan Hukum Islam,” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2. 2020.
- Rahadian, Renardi. O, Tri Cahyo. K, “Semiotika Tanda Visual Film Penyalin Cahaya,” *Jurnal Barik*, Vol. 4, No. 2. 2022.
- Rouf, Cholil, and Suwandi, “Hak Memilih Pasangan Bagi Wali Nikah Di Desa Banyubang Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan Perspektif Gender,” *Jurnal darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 12, No. 2. 2021.

S. Andari, "Film dan realita sosial: Representasi gender dalam sinema Indonesia," *Jurnal Film dan Budaya*, Vol. 8, No. 1. 2021.

Zikriadi, Umar Sulaiman, dan Hifza, "Aneka Jenis Penelitian," *SAMBARA: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1, 2023.

6. Lain-Lain

Fika Nur Faiddatun Najah, "Pesan Dakwah Dalam Film Perjalanan Pembuktian Cinta," *Skripsi* Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2024.

Hafni Sahir, Syafrida, *Metodologi Penelitian*, KBM Indonesia, Jogjakarta. 2021.

<https://retizen.republika.co.id/posts/294181/meneguk-makna-hidup-dari-film-perjalanan-pembuktian-cinta> Disampaikan oleh Munawar Khalil N. pada sabtu, 09 Maret 2024 Pukul 23:23 WIB.

<https://www.kompas.id/baca/gaya-hidup/2024/03/21/terlalu-patuh-bisa-menyesarakan> Disampaikan oleh Sekar Gandhawangi pada 22 Maret 2024 pukul 13:30 WIB.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Ghala Indonesia: Bogor, 2014.

Rofiah, Nur, *Nalar Kritis Muslimah*, Jakarta: Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI), 2020.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Kombinasi (mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi revisi VI, Cetakan ke 13, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta, 2006.

Uchjana, E. Onong, *Dimensi Dimensi Komunikasi*. Bandung: Alumni, 1986.